

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Fadila*, Novi Sentiya², Suharman³

¹Politeknik Negeri Sambas

²Politeknik Negeri Sambas

³Politeknik Negeri Sambas

Submit: 19/10/2024

Revisi : 20/11/2024

Disetujui: 25/11/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sambas, serta apa saja upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan hambatan dalam pemungutannya di Kabupaten Sambas dalam periode tahun 2018 hingga 2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan mixed method dengan sumber data primer dari hasil wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor selama periode 2018 hingga 2022 sudah efektif. Namun pada lima tahun tersebut angka kontribusi tergolong dalam kriteria sangat rendah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor diantaranya dengan meningkatkan akses layanan pajak ke wilayah-wilayah yang jauh dari titik layanan, melakukan program pembebasan denda, memanfaatkan teknologi digitalisasi serta melakukan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya pelaporan dan pembaruan data tentang peralihan kepemilikan kendaraan bermotor.

Kata kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak kendaraan bermotor, pendapatan daerah*

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness and contribution of motor vehicle tax to Sambas Regency regional income, as well as what efforts to increase motor vehicle tax income and the obstacles in collecting it in Sambas Regency in the period 2018 to 2022. This type of research is descriptive using a mixed method approach with primary data sources from interviews and secondary data obtained from documentation. The results of this research show that the level of effectiveness of motor vehicle taxes during the period 2018 to 2022 has been effective. However, in these five years the contribution figures were classified as very low. Efforts made by the government to increase motor vehicle tax revenue include increasing access to tax services to areas far from service points, implementing a fine exemption program, utilizing digitalization technology and conducting campaigns on social media to increase public awareness. Obstacles faced by the government in implementing motor vehicle tax collection include by lack of reporting and updating data regarding the transfer of motor vehicle ownership.

Keywords: *contribution, effectiveness, motor vehicle tax, regional income*

DOI:

Copyright © 2024 Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber penghasilan utama bagi pemerintah guna mendukung pengembangan secara infrastruktur serta fasilitas umum lainnya. Penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memainkan peran sentral dalam pembangunan. "Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pendapatan daerah memainkan peran penting untuk menyokong pembangunan dan pelayanan. "Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sambas

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	29.450.936.300	33.480.096.548	113,7%
2019	35.194.523.800	37.148.110.896	105,6%
2020	34.431.602.500	36.308.416.050	105,5%
2021	42.932.408.200	40.920.591.200	95,3%
2022	45.876.762.400	45.482.450.500	99,1%

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dicapai Kabupaten Sambas tahun 2018-2022 cukup berfluktuasi, di tahun 2018 realisasi melampaui target dengan persentase sebesar 113,7%, tahun 2019 realisasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta mencapai target dengan persentase sebesar 105,6%, tahun 2020 realisasi mencapai target tetapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 105,5%, tahun 2021 realisasi mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelum ini namun tidak mencapai target yakni sebesar 95%, dan tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan lagi dari tahun 2021 serta belum memenuhi target yaitu dengan persentase sebesar 99,1%. Terjadi penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2020 yaitu realisasi menurun dari tahun 2019, seperti yang diketahui saat itu merupakan kondisi pandemi covid 19 yang sedang berlangsung telah menyebabkan penurunan pendapatan di berbagai sektor yang juga berdampak pada pendapatan pajak pemerintah. Badan usaha atau individu mungkin mengalami kesulitan membayar pajak karena kesulitan ekonomi, ini dapat meningkatkan tingkat ketidakpatuhan pajak.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan umumnya merupakan kontributor pendapatan daerah yang cukup signifikan bagi pemerintah provinsi namun pendapatan yang diterima pajak kendaraan bermotor diberikan ke kabupaten/kota sekitar 30%.

Tabel 2 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sambas

Tahun	Roda 2	Roda 4	Total
2019	1.720.015.475	548.725.325	2.268.740.800
2020	2.083.781.725	850.145.014	2.933.926.739
2021	2.052.349.025	986.524.189	3.038.873.214
2022	2.563.017.300	1.422.332.779	3.985.350.079
2023	4.079.110.225	3.344.771.132	7.423.881.357

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel 1.2, tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, pada periode 2020 meningkat sebesar 665.185.939 dari tahun 2019, kemudian meningkat sebesar 104.946.475 di tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat sebesar 946.476.865, selanjutnya yang paling signifikan di tahun 2023 yaitu meningkat sebesar 3.438.531.279. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak Uray Syafriansyah sebagai Kasi Penetapan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang, tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa hal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas terhadap pelayanan, dan kurangnya informasi tentang pentingnya membayar pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, instansi terkait berencana melakukan terobosan baru dan meningkatkan penggunaan *platform* digital seperti *WhatsApp* dan *Instagram* untuk pengumuman. Meskipun demikian, penggunaan baliho di titik-titik keramaian juga tetap dilakukan. Umumnya kendaraan bermotor pasti akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak bisa dipungkiri bahwa kendaraan sangat menunjang aktivitas sehari-hari maupun dalam pekerjaan sehingga mobilitas yang meningkat akan mendukung pertumbuhan ekonomi pula. Berikut ini merupakan tabel jumlah kendaraan terdaftar di Kabupaten Sambas periode 2019-2023.

Tabel 3 Jumlah Kendaraan Terdaftar di Kabupaten Sambas

Tahun	Roda 2	Roda 4	Total
2019	13.552	892	14.444
2020	9.101	798	9.899
2021	13.488	1.198	14.686
2022	14.819	1.537	16.356
2023	15.887	1.608	17.495
Jumlah	66.847	6.033	72.880

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 pada umumnya setiap tahun kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Sambas terjadi peningkatan baik pada roda dua maupun roda empat yang cukup pesat, hanya saja di tahun 2020 menurun dari tahun 2019 sebesar 14.444 yang kemudian di tahun 2020 turun menjadi 9.899. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan maka semakin banyak pula pajak yang didapatkan oleh pemerintah, namun pemerintah harus tetap mengontrol agar dapat berjalan dengan normal karena semakin banyak kendaraan juga akan menimbulkan resiko seperti kepadatan lalu lintas, polusi udara yang meningkat, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, karena itu dibutuhkan adanya pengendalian dan perencanaan yang matang dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat Sambas/Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang selama enam bulan dimulai dari Januari s.d Juni 2023. Data sekunder berupa data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022 dan yang diperoleh langsung dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang, data bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022 dan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, serta berbagai jurnal-jurnal, buku dan internet. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara atau informasi yang didapat dari Kepala Seksi Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang yaitu bapak Uray Syafriansyah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, di mana peneliti mencari informasi dari sumber tertulis atau lisan yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka yaitu

pengumpulan data ditujukan untuk pencarian data dan informasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan rujukan dari penelitian terdahulu. Referensi diperoleh dari riset sebelumnya, buku, e-book, jurnal, dan internet serta berbagai sumber lain yang relevan dari pustaka dan instansi yang terkait dengan masalah penelitian, serta wawancara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan formulasi analisis efektifitas dan kontribusi sebagai berikut: efektifitas dan kontribusi sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. metode yang digunakan untuk mengukur efektifitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor menurut (Astanto, 2006) dalam (Khoiriyah & Puspita, 2020) di formulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi PKB}{Target PKB} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan kriteria penilaian tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sambas didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang kriteria penilaian kinerja dan keuangan daerah dalam (Khoiriyah & Puspita, 2020) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Tingkat Pencapaian (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
89-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Khoiriyah & Puspita, 2020)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu metode analisis yang dipergunakan untuk menilai sejauh mana kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah, dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan daerah pada periode yang sama. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam (Khoiriyah & Puspita, 2020) diformulasikan sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi PKB}{Realisasi Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan kriteria penilaian tingkat kontribusi didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja dan Keuangan Daerah dalam (Khoiriyah & Puspita, 2020) yaitu:

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Dari Kontribusi

Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: (Khoiriyah & Puspita, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Tingkat keefektifan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sambas dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sambas

Tabel 6 Tingkat Efektivitas dan Kriteria Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sambas

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas(%)	Kriteria
2018	29.450.936.300	33.480.096.548	113,7	Sangat Efektif
2019	35.194.523.800	37.148.110.896	105,6	Sangat Efektif
2020	34.431.602.500	36.308.416.050	105,5	Sangat Efektif
2021	42.932.408.200	40.920.591.200	95,3	Efektif
2022	45.876.762.400	45.482.450.500	99,1	Efektif

Sumber : Data Diolah (2024)

Tahun 2018 telah mencapai hasil yang melebihi target, yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dengan target senilai Rp 29.450.936.300 dan realisasinya senilai Rp 33.480.096.548 menunjukkan efektivitas sebesar 113,7%. Tingkat efektivitas pada tahun 2019 dari penerimaan pajak kendaraan bermotor telah masuk ke dalam kategori sangat efektif dikarenakan telah melebihi target. Dengan nilai target Rp 35.194.523.800 dan nilai realisasinya Rp 37.148.110.896 menunjukkan efektivitas sebesar 105,6%. Tingkat efektivitas pada tahun 2020 masih berada dalam kondisi sangat efektif, penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target. Dengan target senilai Rp 34.431.602.500 dan realisasinya senilai Rp 36.308.416.050 menunjukkan efektivitas senilai 105,5%. Target yang ditetapkan tersebut lebih sedikit dari tahun 2019 serta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang kemungkinan besar karena pada saat itu wabah *Covid 19* masih berlangsung sehingga pemerintah tidak berharap banyak dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi realisasi pajak kendaraan bermotor belum mencapai target, tetapi masih dalam kategori efektif. Dengan target senilai Rp 42.932.408.200 dan realisasi senilai Rp 40.920.591.200 menunjukkan efektivitas sebesar 95,3%. Realisasi pada tahun 2022 masih meningkat dibanding tahun sebelumnya namun realisasi belum berhasil mencapai target namun dalam kategori efektif. Dengan target senilai Rp 45.876.762.400 dan realisasi senilai Rp 45.482.450.500 menunjukkan efektivitas sebesar 99,1 %. Pendapatan pajak kendaraan bermotor selama periode 2018 hingga 2022 mencapai di tingkat efektivitas yang tinggi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan indikator

kesuksesan dalam mencapai misi organisasi. Tingkat efektivitas yang tinggi menandakan bahwa Samsat Sambas telah berhasil dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

2. Kontribusi

Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, oleh karena itu pajak kendaraan bermotor ini turut serta dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah.

Tabel 8 Tingkat Kontribusi dan Kriteria PKB Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas

Tahun	Realisasi Bagi Hasil PKB	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	11.748.811.186	1.699.544.377.805	0,7	Sangat Kurang
2019	10.518.601.510	1.834.749.639.330	0,6	Sangat Kurang
2020	9.457.664.465	1.669.647.856.826	0,6	Sangat Kurang
2021	14.580.761.022	1.850.514.381.733	0,8	Sangat Kurang
2022	13.534.626.233	1.706.793.890.995	0,8	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2024)

Tingkat kontribusi atau sumbangan yang dari pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2022 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 dengan realisasi bagi hasil sebesar Rp 11.748.811.186 dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.699.544.377.805 menunjukkan kontribusi sebesar 0,7%. Pada tahun 2019 dengan nilai realisasi bagi hasil yang mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp 10.518.601.510 dan realisasi pendapatan daerah yang meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.834.749.639.330 yang menunjukkan kontribusi sebesar 0,6%. Tahun 2020 dengan realisasi bagi hasil yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 9.457.664.465 dan realisasi pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai Rp 1.669.647.856.826 menunjukkan kontribusi yang sama dengan tahun 2019 yaitu 0,6%. Tahun 2021 realisasi bagi hasil meningkat dari tahun 2020 yaitu senilai Rp 14.580.761.022 dan realisasi pendapatan daerah juga meningkat dari tahun 2020 yaitu senilai Rp 1.850.514.381.733 yang menunjukkan kontribusi sebesar 0,8%. Pada tahun 2022 realisasi bagi hasil pajak mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu senilai Rp 13.534.626.233 dan realisasi pendapatan daerah juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni senilai Rp 1.706.793.890.995 menunjukkan kontribusi yang sama dengan tahun 2021 yaitu 0,8%. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 tingkat kontribusinya berada dalam kriteria sangat kurang atau rendah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor amatlah kecil jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas. di Kabupaten Sambas

3. Upaya Pemerintah

Pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pajak kendaraan bermotor dengan mendirikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di berbagai lokasi, termasuk Samsat Induk, Samsat Pembantu, gerai, dan Samsat Keliling (Samkel) malam. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus bepergian jauh sehingga menjadi lebih efisien bagi masyarakat. Penetapan layanan di daerah yang sebelumnya tidak memiliki titik layanan, seperti program SAGON (Samsat Go Perbatasan) di Kecamatan Sajingan Besar.

Tahun 2023 pemerintah kembali memberi keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah telah memanfaatkan teknologi dengan mendorong digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor. Melalui *QRIS* dan aplikasi cek pajak "Samsat Kalbar" yang bisa di *download* di *playstore* hingga masyarakat dapat mengetahui jumlah pajak kendaraan bermotor yang akan dibayar tidak harus pergi ke layanan samsat terdekat.

Selain itu, pemerintah juga melakukan kampanye kesadaran pajak menggunakan media sosial yaitu *Instagram*, *Facebook*, dan *platform* lainnya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan mempromosikan layanan yang telah disediakan.

4. Hambatan

Hambatan yang dihadapi terkait dengan kurangnya pelaporan dan pembaruan data tentang peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak kendaraan yang telah berpindah tangan namun tidak melakukan peralihan hak atau balik nama. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan data dan kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik yang sebenarnya, sehingga proses pemungutan pajak menjadi terhambat. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam pengiriman informasi kepada wajib pajak perorangan. Meskipun menggunakan jasa pengiriman seperti JNE dan aplikasi kepatuhan, namun masih terdapat kendala dalam memastikan data yang diterima oleh wajib pajak benar dan akurat. Terutama terkait dengan kendaraan yang telah berpindah tangan namun masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Hambatan lainnya yang dihadapi adalah kendala praktis terkait dengan kebijakan. Contohnya, banyak kendaraan roda 2 plat merah yang tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga beban pajak beralih kepada pengguna. Ini menciptakan ketidakjelasan dalam sistem pemungutan pajak.

KESIMPULAN

Berlandaskan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti menarik kesimpulan bahwa: Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor selama periode 2018 mencapai tingkat 113,7%, pada tahun 2019 mencapai tingkat 105,6%, dan pada tahun 2020 mencapai tingkat 105,5% dimana selama tiga tahun tersebut menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Pada tahun 2021 mencapai tingkat 95,3% dan pada tahun 2022 mencapai tingkat 99,1% dimana pada dua tahun tersebut menunjukkan kriteria efektif. Efektivitas dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Samsat Sambas selama periode 2018 hingga 2022 mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Tingkat efektivitas yang tinggi menandakan bahwa target pendapatan pajak kendaraan bermotor telah tercapai atau bahkan melebihi yang ditetapkan, yang pada gilirannya mendukung upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai tingkat 0,7%, pada tahun 2019 dan 2020 mencapai tingkat 0,6%, pada tahun 2021 dan 2022 mencapai tingkat 0,8%. Meskipun pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, pada lima tahun tersebut angka kontribusi tergolong dalam kriteria sangat rendah atau dapat dikatakan tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sambas selama tahun 2018 sampai dengan 2022 sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Meskipun demikian, pajak kendaraan bermotor tetap berperan dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sambas.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor diantaranya yaitu dengan meningkatkan akses layanan pajak ke wilayah-wilayah yang jauh dari titik layanan, melakukan program pembebasan denda, memanfaatkan teknologi digitalisasi dengan menggunakan *QRIS* dan aplikasi "Samsat Kalbar", serta melakukan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor antara lain, kesulitan dalam komunikasi antara Samsat dengan pemerintah daerah atau

perusahaan karena surat yang disampaikan oleh Samsat tidak selalu ditanggapi, kurangnya pelaporan dan pembaruan data tentang peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak kendaraan yang telah berpindah tangan namun tidak melakukan peralihan hak atau balik nama.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti satu jenis pajak daerah tetapi juga meneliti beberapa jenis pajak daerah lainnya dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu, tidak hanya lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoiriyah, N., & Puspita, A. F. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di UPT PPD Gresik.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018*. Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019*. Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020*. Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021*. Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022*. Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *UU RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.